

## ABSTRAK

### **Risal Ismail: *Pandangan Pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina.***

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan kontemporer yang ada wanita hamil zina. Perbedaan pendapat ini tidak berhenti di para ulama terdahulu saja, melainkan di Indonesia juga, khususnya dikalangan ulama di organisasi masyarakat, sebagaimana ketentuan perkawinan wanita hamil akibat zina yang dikeluarkan Dewan Hisbah Persatuan Islam tidak sama dengan apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, pandangan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, dan relevansi pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

Penelitian ini bergerak dengan kerangka pemikiran bahwa hukum Islam yang dapat memberikan solusi dan petunjuk yang mudah dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan manusia sesuai dengan tuntunan utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap, hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia untuk berjihad terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nash dan hukumnya secara jelas dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari hasil pemahaman terhadap sumber hukum utama inilah yang memunculkan perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam skripsi ini yaitu dengan mengambil pendapat dari Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) melalui wawancara semiterstruktur dan studi kepustakaan. Hasil dari wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) mengenai perkawinan wanita hamil zina adalah mengharamkan perkawinan wanita tersebut sampai ia melahirkan dan wanita itu harus menikah dengan laki-laki yang menzinahnya berbeda dengan isi dari Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil yang membolehkan melangsungkan perkawinan wanita hamil tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan. Sedangkan pandangan pengurus Dewan Hisbah terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil zina ialah merasa bingung dalam artian bukan tidak terbaca atau bukan tidak dibahas oleh Dewan Hisbah melainkan tidak mengerti atas dasar hukum dan arah isi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil zina tersebut dan bisa dimungkinkan ketentuan dari pasal 53 KHI ini justru dikhawatirkan akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinahan. Relevansi pendapat antara Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil adalah sama-sama bertujuan untuk memuliakan atau melindungi kehormatan diantara kedua pasangan dan keturunannya. Tetapi dalam suatu kecocokan atau saling berhubungan pendapat antara Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dengan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut memiliki cara dan jalan yang berbeda dalam memberikan solusi dari hukum perkawinan wanita hamil zina tersebut.